



RAPERDA DISERAHKAN KE DEWAN

OPD Dirombak, Jabatan Eselon II Berkurang

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengusulkan perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) ke kalangan legislatif. Meski masih dalam rancangan, namun akan ada pengurangan jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Yogya. Hal ini lantaran salah satu semangat perombakan ialah perampingan organisasi di samping menyesuaikan aturan dari pemerintah pusat.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya Sarwanto, menjelaskan naskah raperda terkait penataan perangkat daerah sudah diserahkan walikota kepada lembaga dewan. "Nanti kami akan menunggu proses pembahasan bersama dewan. Setelah itu juga harus ada evaluasi dari Gubernur. Namun hasil dari evaluasi proses bisnis, akan ada pengurangan tiga jabatan eselon II," jelasnya, Rabu (16/10).

Evaluasi proses bisnis dilakukan guna menelaraskan kelembagaan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penataan OPD terakhir kali dilaku-

kan pada tahun 2018, sedangkan RPJMD diusun tahun 2017. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) pun merekomendasikan agar ada penelarasan kelembagaan dengan sasaran RPJMD.

Sarwanto menambahkan, pengurangan tiga jabatan eselon II akibat dari beberapa OPD yang akan digabung. Terutama Dinas Pendidikan yang akan melebur ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB akan melebur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. "Selain itu juga

ada empat OPD yang akan dirombak menjadi tiga kelembagaan. Peleburan itu otomatis akan mengurangi jumlah jabatan eselon II," imbuhnya.

Empat OPD yang akan dirampingkan ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas. Perampingan tersebut menjadi tiga lembaga yakni Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Koperasi dan Pertanian, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selain perampingan organisasi, ada beberapa penyesuaian akibat regulasi dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini pun hanya bersifat perubahan nomenklatur kelembagaan. Di antaranya Kantor Kesatuan Bangsa menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. "Ada juga hasil rekomendasi dari KPK agar

urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipisah. Sehingga nanti BPKAD menjadi dua badan yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah," urai Sarwanto.

Khusus untuk penyesuaian dengan Undang-undang Keistimewaan, sejumlah OPD juga akan disesuaikan namanya. Seperti Dinas Kebudayaan menjadi Kundha Kabudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, dan kecamatan menjadi Kemantren.

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiymoko, mengaku siap melakukan pembahasan raperda terkait penataan kelembagaan. Meski sisa waktu tinggal tiga bulan ke depan, namun pihaknya komitmen bisa menyelesaikan bersama pembahasan raperda terkait APBD 2020 serta revisi retribusi daerah. (Dhi)-m

Tindak

Untuk D

Untuk C

Jumpa

ala

s.Sos, N
199603 1 00

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005